

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN PIDANA KEBIRI SEBAGAI UPAYA REHABILITATIF BAGI PELAKU PEMERKOSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Stefani Salimatul Hayat

1687081

Negara Hukum Republik Indonesia memberikan hukuman pidana tambahan kepada para pelaku pemerkosa khususnya pemerkosa terhadap anak dengan pidana tambahan berupa kebiri kimia untuk menjaga keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakatnya. Penerapan hukuman kebiri kimia ini mendapatkan pro dan kontra dari berbagai pihak mengingat proses pengebirian secara paksa dianggap sebagai hukuman yang tidak manusiawi dan melanggar Hak Asasi Manusia. Hal ini yang menjadi titik penelitian penulis, yaitu tentang hukuman pidana kebiri sebagai upaya rehabilitatif bagi pelaku pemerkosa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan fokus penerapan kaidah atau norma hukum pidana dan hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan konseptual yang mengacu kepada bahan hukum primer, seperti Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 5 tahun 1998 tentang Kovensi Menentang Penyiksaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum pidana, Hak Asasi Manusia, pendapat para ahli dan jurnal-jurnal mengenai hukum pidana.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukuman pidana sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia, jika hukuman pidana kebiri secara rehabilitatif diterapkan di Indonesia, hukuman tersebut tidak melanggar Hak Asasi Manusia mengingat hukuman yang secara rehabilitatif tersebut pelaku pemerkosa yang telah dijatuhkan hukuman dapat memilih.

Kata Kunci: Pelaku Pemerkosa, Pidana Kebiri, Pengebirian Kimia, Hak Asasi Manusia, Rehabilitatif

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW ON CRIMINAL LAW OF EMASCULATION AS A REHABILITATIVE EFFORT FOR THE RAPE PERPETRATORS REVIEWED ON ACT NO 17 YEAR 2016 ABOUT GOVERNMENT REGULATIONS IN LIEU OF LAWS NO 1 YEAR 2016 CONCERNING THE SECOND CHANGE ON 23 YEAR 2002 ON CHILD PROTECTION

Stefani Salimatul Hayat

1687081

Indonesian Republic State of Law provides an additional criminal punishment for children rape perpetrators in a form of chemical emasculation to maintain the safety and the orderliness of the living society. The enforcement of the additional law of the chemical emasculation obtaining a pros and cons from a various parties remembering that a forced emasculation could be considered as an inhumane punishment and violating human rights. This is what the author's main point of research, which is about emasculation punishment as a rehabilitative effort for the rape perpetrators based from Act No. 23 of on child protection.

The type of method that was used for this study is a normative juridical, with the focus implementation of the rules and norms of criminal law and human rights. The approach that used is a legal conceptual approach that refers to the plrimary legal material, such as Perppu No. 1 year 2016, Act No. 23 2002 on child protection, Act No. 5 year 1998 on Convention Against Torture, The Code of Criminal Law, human rights, experts' opinions and journals about criminal law.

The result concluded that the criminal punishment is appropriate enough according to Indonesian criminal law system which is a combination of theories, if the rehabilitative emasculation punishment is applied in Indonesia. The punishment itself does not violated the human rights remembering that the rape perpetrators obtaining a right to choose their punishment, which is being emasculated or imprisoned.

Keywords: Rape Offender, Emasculation Punishment, Chemical Emasculation, Human Rights, Rehabilitative

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Pernyataan Keaslian	
Pengesahan Pembimbing	
Persetujuan Revisi Tugas Akhir	
Persetujuan Panitia Sidang Ujian	
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
Prakata.....	vii
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINDAK PIDANA DAN TUJUAN PEMIDANAAN	
A. Pengertian Dan Unsur Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	28
3. Jenis Tindak Pidana.....	33
4. Jenis Sanksi Pidana.....	36
B. Pemidanaan Dan Tujuan Pemidanaan.....	39
1. Pengertian Pemidanaan.....	39

2. Tujuan Pemidanaan.....	41
3. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	43
4. Konvensi Anti Penyiksaan.....	50

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN HUKUMAN
BAGI PEMERKOSA ATAU PENCABULAN ANAK**

A. Pelaksanaan Hukuman Bagi Pemerkosa Di Indonesia...	53
1. Perkosaan Di Indonesia.....	53
2. Hukuman Bagi Pemerkosa Di Indonesia.....	57
B. Pencabulan Terhadap Anak.....	61
1. Pengertian Pencabulan.....	61
2. Jenis-Jenis Tindakan Pencabulan.....	63
3. Pengertian Anak Dibawah Umur.....	65
4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Peningkatan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak.....	66
5. Dampak Pencabulan Terhadap Anak.....	68

**BAB IV ANALISIS TERHADAP HUKUMAN PIDANA KEBIRI SEBAGAI
UPAYA REHABILITATIF BAGI PELAKU PEMERKOSA DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG
PENGESAHAN PERPPU NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK**

A. Kesesuaian Penjatuhan Hukuman Pidana Kebiri Dengan Sistem Pemidanaan Di Indonesia.....	73
B. Penjatuhan Hukuman Pidana Kebiri Sebagai Upaya Rehabilitatif Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia.....	80

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA.....	95
----------------------------	-----------

CURRICULUM VITAE



Lampiran

MATRIX Tugas Akhir

